



**DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

LAPORAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

TAHUN 2024

KEADAAN S/D DESEMBER 2024

KUPANG, JANUARI 2025

LAPORAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA DPMPTSP PROVINSI NTT

KEADAAN S/D DESEMBER TAHUN 2024

A. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Rencana Kinerja Tahunan merupakan rencana kerja yang akan dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024 – 2026 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT Tahun 2024 mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi NTT pada Urusan Penanaman Modal, Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur NTT dan Indikator Kinerja dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT Tahun 2024 – 2026 serta Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan serta Anggaran (DPA) Tahun 2024 yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan Rencana Kerja Tahunan tersebut ditindaklanjuti dengan penyusunan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT, yang memuat komitmen untuk melaksanakan dan mewujudkan rencana kinerja baik kinerja keluaran (output) dari kegiatan yang dilaksanakan tahun 2024 maupun hasil yang dicapai (outcome) dari program yang dilaksanakan tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang dipertanggungjawabkan kepada Gubernur NTT sebagai pimpinan. Untuk itu, seluruh unit kerja (sekretariat, bidang/sub bidang) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pelaksanaan program dan kegiatan dalam tahun 2024 tentunya berkomitmen untuk mendukung pencapaian indikator kinerja dan sasaran strategis yang diperjanjikan.

Untuk mengukur capaian Kinerja digunakan Formula apabila semakin tinggi Realisasi menunjukkan semakin tinggi Kinerja demikian sebaliknya semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendah Kinerja.

Sedangkan untuk mengukur Laju Pertumbuhan Kinerja Investasi digunakan Formula Realisasi Investasi Tahun ini dikurangi Tahun sebelumnya dibagi dengan Tahun sebelumnya.

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Perkembangan (\%)} = \frac{\text{Realisasi saat ini} - \text{Realisasi tahun sebelumnya}}{\text{Realisasi tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

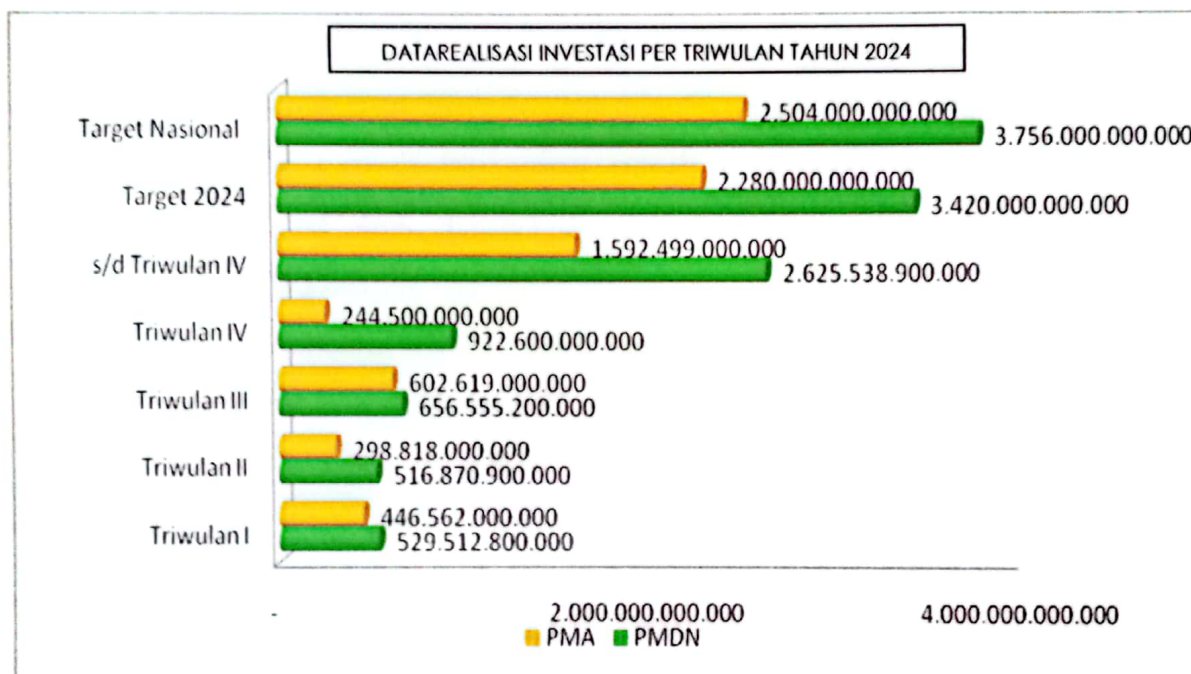
Tabel 1

Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja (PK) Urusan Penanaman Modal
Tahun 2024 Keadaan s/d Bulan Desember Tahun 2024

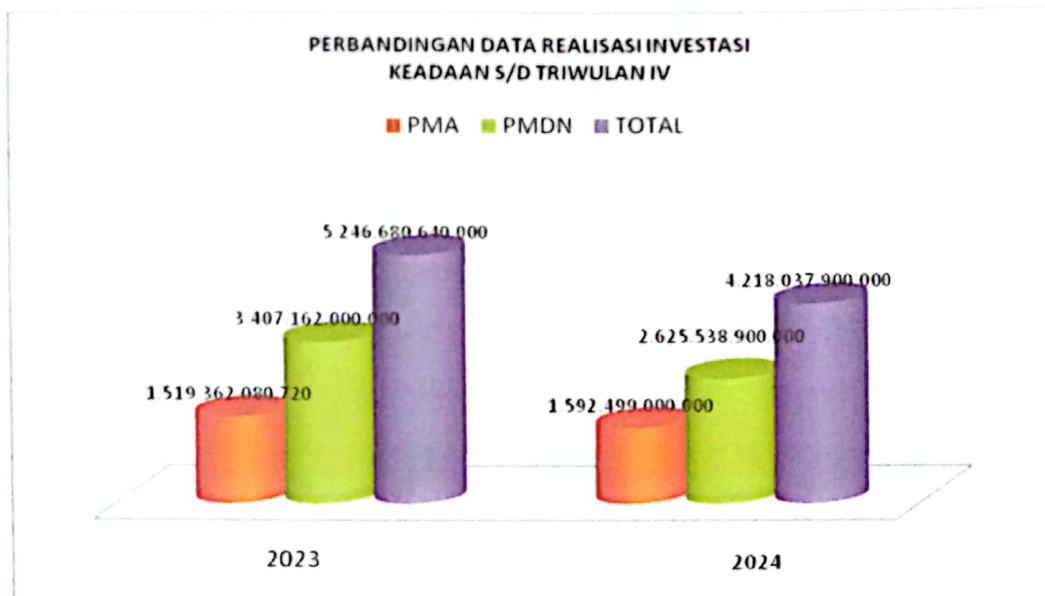
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1 Meningkatkan realisasi investasi	1. Penambahan Nilai Realisasi Investasi	5,7 T	Rp. 4.218.037.900.000	74%
	1. Laju pertumbuhan PMDN	0,7%	-1,56%	-100%
	2. Laju pertumbuhan PMA	0.3%	-1,56%	-100%
2 Terwujudnya kepuasan layanan Perizinan & Non Perizinan	3. Persentase izin dan non izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	100% (5.000 Izin)	5.373	107,46%
	4. Nilai indeks kepuasan masyarakat meningkat	95	94,82	99,81%

- 1) Capaian Indikator **Kinerja Penambahan Nilai Realisasi Investasi** . Target yang ingin dicapai tahun 2024 adalah 5,7 Triliun, dengan Realisasi s/d Triwulan IV Tahun 2024 Rp 4.218.037.900.000,- atau sebesar 74% dengan Rincian PMDN Rp. 2.625.538.900.000,- (46,06%) PMA. Rp. 1.592.499.000.000,- (27,94%) dengan jumlah Proyek sebanyak 5.747 Proyek, terdiri dari PMA : 1.102 proyek/kegiatan investasi dan PMDN : 4.649 proyek/kegiatan investasi dan penyerapan Tenaga Kerja sebanyak 5.099 orang Tenaga Kerja. Bila dibandingkan dengan

Tahun 2023 maka ada penurunan sebesar 26,5%. Rincian Realisasi Investasi per Triwulan sebagai berikut : Realisasi Triwulan I sebesar Rp. 976.074.800.000,- (PMDN: Rp. 529.512.800.000,- PMA: Rp. 446.562.000.000,-) Realisasi Investasi Triwulan II Rp. 815.688.900.000,- (PMDN : Rp. 516.870.900.000,- PMA: Rp. 298.818.000.000,-) Realisasi Investasi Triwulan III Rp. 1.259.174.200.000,- (PMDN : Rp. 656.555.200.000,- PMA: Rp. 602.619.000.000,-) Realisasi Triwulan IV sebesar Rp. 1.167.100.000,- (PMDN: Rp. 922.600.000.000,- PMA: Rp. 244.500.000.000,-) . Lima Besar Negara penyumbang investasi di Provinsi NTT antara lain Singapura, Amerika, Jepang, Swis dan Italia.



- 2) Capaian indikator **Kinerja Laju Pertumbuhan PMDN** : Target yang ingin dicapai adalah 0,7 %. Realisasi PMDN s/d Triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp. 2.625.538.900.000,- bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp. 3.407.162.000.000,- maka ada penurunan sebesar Rp. 781.623.100.000,- atau -22,9%
- 3) Capaian indikator **Kinerja Laju Pertumbuhan PMA** : Target yang ingin dicapai adalah 0,3 %. Realisasi PMA s/d Triwulan IV senilai Rp. 1.592.499.000.000,- bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp. 1.839.518.640.000,- maka ada penurunan sebesar Rp. 247.019.640.000,- atau -13,4 %



- 4) Capaian **indikator Kinerja Persentase izin dan non izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP**. Target 100 %, Realisasi s/d bulan Desember Tahun 2024 jumlah izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP mencapai 107,46%. Target Jumlah Izin yang diterbitkan 5.000 Izin realisasi 5.373 izin .
- 5) Capaian **Indikator Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat**. Target kinerja tahun 2024 sebesar 95, Realisasi Triwulan I 93,37 atau capaian Kinerjanya 98,28%. Triwulan II 91,31% atau capaian Kinerjanya 96,11% . Triwulan III 92,53 atau capaian Kinerjanya 97,4%. Triwulan IV 94,82 atau capaian Kinerjanya 99,81%. artinya senantiasa dilakukan pembenahan dan perbaikan pelaksanaan pelayanan. Hasil survey kepuasan masyarakat tahun 2024 adalah Hasil survey Triwulan Setiap Triwulan dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, dengan metode yaitu secara online melalui HP Android dengan menscan barcode yang ada serta melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat yang mengurus izin, kemudian mereka memberikan penilaian terhadap 9 (sembilan) aspek, yaitu **persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana pelayanan, maklumat pelayanan dan penanganan pengaduan**.

A. Perkembangan Realisasi Investasi dan Pelayanan Perizinan Di Provinsi NTT Tahun 2024

a. Target dan Realisasi Investasi

Target Realisasi Investasi untuk Provinsi NTT sebesar Rp. 5,7 T. dengan Realisasi s/d Triwulan IV Tahun 2024 Rp. 4.218.037.900.000,- atau sebesar 74 % dengan Rincian PMDN Rp. 2.625.538.900.000,- dengan jumlah Proyek sebanyak 4.649 Proyek & PMA Rp. 1.592.499.000.000,- dengan jumlah Proyek sebanyak 1.102 Proyek. Capaian Kinerja sesuai Target Nasional Tahun 2024 6,2 Triliun adalah 67,38 % .



b. Target dan Realisasi Perizinan

Target dan Realisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perijinan : Target jumlah izin yang diterbitkan Tahun 2024 sebanyak 5.000 Ijin Realisasi s/d bulan Desember Tahun 2024 sebanyak 5.373 buah Izin (107,46 %). Dari tahun ke tahun jumlah jenis izin yang didelegasikan penandatanganan perizinan dan non perizinan dari Gubernur kepada Perangkat Daerah Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu terus meningkat. Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2019, ada tambahan 1 Bidang yaitu Bidang Pendidikan dan Kebudayaan serta Tahun 2020 ada tambahan 1 Bidang yaitu Bidang Koperasi. Sehingga jumlah izin

dan non izin yang didelegasikan sampai saat ini kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebanyak 18 Bidang dan 158 jenis izin dan non izin. Pada tahun 2021 direvisi menjadi, ada 15 Jenis Bidang Usaha, dan 145 jenis perizinan dan non perizinan (Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Dari Gubernur Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Provinsi NTT).

Sesuai amanat PP Nomor 5 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko mengkategorikan semua jenis kegiatan usaha dalam 4 (empat) kelompok, yaitu : kegiatan usaha beresiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan kegiatan usaha beresiko tinggi). Untuk yang beresiko rendah (cukup dengan **Nomor Induk Berusaha/NIB**), risiko menengah rendah (**NIB & Sertifikat Standar/SS berupa pernyataan mandiri**), risiko menengah tinggi (NIB & Sertifikat Standar/SS yang diverifikasi) dan usaha yang risiko tinggi (**NIB & Izin**). Dari aspek modal usaha, yaitu Usaha Mikro (di bawah Rp. 1 Miliard), Usaha Kecil (di atas Rp. 1 M - 5 M) , Usaha Menengah (Rp. 5 M – 10 M) dan Usaha Besar (di atas R. 10 Miliard).

Untuk implementasinya Pemerintah Provinsi NTT telah menetapkan Pergub Nomor 127 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT. **Dari total jumlah 815 jenis perizinan dan non perizinan yang didelegasikan ada 791 jenis perizinan dan 24 jenis non perizinan.** Dalam Pergub Nomor 127 Tahun 2022, jenis perizinan berusaha dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu :

- a) Perizinan Berusaha Sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-

UMKU), ada 11 Sektor dan 759 jenis usaha yang terdiri dari ber KBLI : 744 jenis usaha dan PB-UMKU : ada 15 jenis usaha ;

- b) Perizinan Berusaha Non KBLI, ada 8 Sektor dan 24 jenis usaha;
- c) Perizinan Non Berusaha dan Non KBLI : ada 4 Sektor dan 8 jenis usaha ;
- d) Non Perizinan : ada 8 Sektor dan 24 jenis usaha.

Untuk proses pelayanan perizinan menggunakan 2 (system), yaitu pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara eletronik berbasis resiko melalui System Onlne Single Submission (OSS) Risk Based Approach (RBA) dan non elektronik /manual lebih banyak izin penelitian dan yang non perizinan.

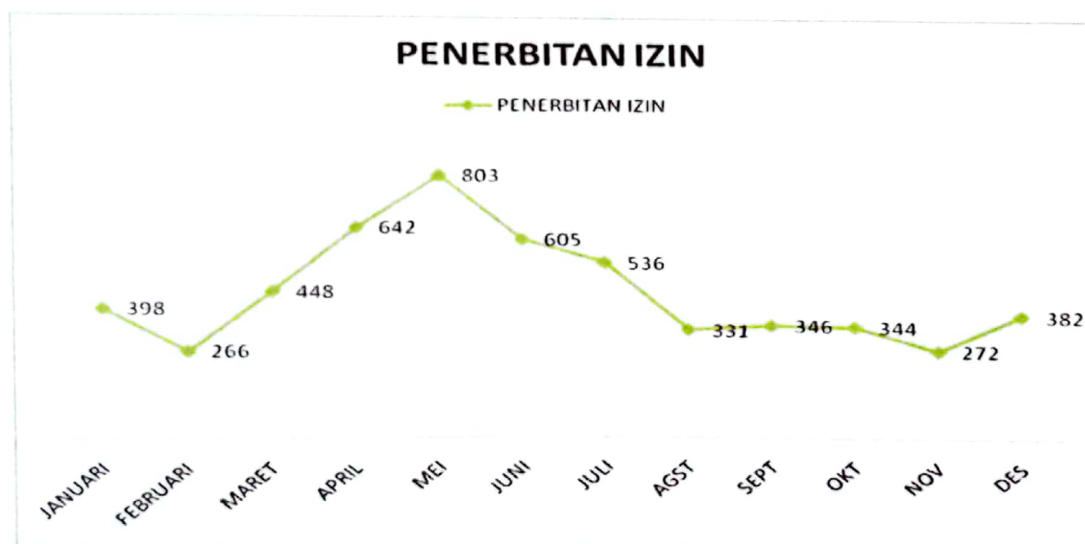
Pada tahun 2022 dilakukan revisi terhadap Pergub Nomor 37 Tahun 2021 dengan Pergub Nomor 127 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan, dimana semua jenis perizinan di kelompokkan dalam 4 (empat) kategori sesuai tingkatan resiko pelaksanaan kegiatan usaha, yaitu kegiatan usaha beresiko rendah, menengah rendah, resiko menengah rendah dan kegiatan usaha beresiko tinggi (amanat PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko). Ada 791 jenis perizinan dan 24 jenis non perizinan yang didelegasikan kepada DPMPTP Provinsi NTT. Data perizinan berusaha menurut sektor Tahun 2024 di Provinsi NTT sebagaimana pada Tabel 2 berikut ini.

No.	Sektor	Jumlah Izin	Jumlah SOP
A.	Perizinan Berusaha Sesuai KBLI & PB-UMKU	759 Jenis Perizinan	759
1.	Sektor Kesehatan	9 (sembilan) Jenis izin	9
2.	Sektor Perhubungan	30 (tiga puluh jenis perizinan	30
3.	Sektor Pertanian	24 (dua puluh tiga) jenis perizinan	24
4.	Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	31 (tiga puluh satu) jenis perizinan	31
5.	Sektor Kelautan dan Perikanan	77 (tujuh puluh tiga) jenis perizinan	77

6.	Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	43 (empat puluh tiga) jenis perizinan	43
7.	Sektor Pariwisata	24 (dua puluh empat) jenis perizinan	24
8.	Sektor Perdagangan	1 (Satu) jenis perizinan	1
9.	Sektor Ketenagakerjaan	2 (dua) jenis perizinan	2
10.	Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2 (dua) jenis perizinan	2
11.	Sektor Perindustrian	513 (lima ratus tiga belas) jenis perizinan	513
B.	Perizinan Berusaha Non KBLI	24 Jenis Perizinan	
1.	Sektor Sosial	1 (Satu) jenis perizinan	1
2.	Sektor Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1 (Satu) jenis perizinan	1
3.	Sektor Pendidikan dan Kebudayaan	2 (dua) jenis perizinan	2
4.	Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 (satu) jenis perizinan	1
5.	Sektor Peternakan	8 (delapan) jenis perizinan	8
6.	Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4 (empat) jenis perizinan	4
7.	Sektor Perdagangan	1 (satu) jenis perizinan	1
8.	Sektor ESDM	6 (enam) jenis perizinan	6
C.	Perizinan Non Berusaha Non KBLI	8 Jenis Perizinan	
1.	Sosial	2 (dua) jenis perizinan	2
2.	Pendidikan dan Kebudayaan	2 (dua) jenis perizinan	2
3.	Peternakan	1 (satu) jenis perizinan	1
4.	Kesbangpol	3 (tiga) jenis perizinan	3
D.	Non Perizinan	24 Jenis Perizinan	
1.	Sektor Kesehatan	2 (dua) jenis non perizinan	2
2.	Sektor Perhubungan	3 (tiga) jenis non perizinan	3

3.	Sektor Kelenagakerjaan	2 (dua) jenis non perizinan	2
4.	Sektor Pendidikan dan Kebudayaan	1 (salu) jenis non perizinan	1
5.	Sektor Peternakan	3 (tiga) jenis non perizinan	3
6.	Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	9 (sembilan) jenis non perizinan	9
7.	Sektor Perdagangan	2 (dua) jenis non perizinan	2
8.	Sektor Kesbangpol	2 (dua) jenis non perizinan	2
	Total	791 Jenis Perizinan & 24 Non Perizinan	815

Perizinan yang diterbitkan Tahun 2024 s/d bulan Desember 2024 sebanyak 5.373 buah Izin, dari Target sebanyak 5.000 Izin atau rata – rata perbulan \pm 447 buah Izin yang diterbitkan , atau perhari sebanyak 20 Izin. Capaiannya 107,46 %. Data jumlah izin yang diterbitkan tahun 2024 **(Proses Penerbitan Izin Melalui Front Office DPMPSTSP Provinsi NTT, pemohon datang langsung ke kantor)** , adalah sebagaimana pada Gambar 3 berikut ini.



Gambar. 3

Grafik Izin yang diterbitkan per bulan s/d bulan Desember Tahun 2024

Izin yang diterbitkan s/d bulan Desember Tahun 2024 melalui Front Office sebanyak 5.373 Izin dari Target 5.000 Izin atau 107,46% dengan Rincian per Bidang sebagai berikut :

Tabel
Jumlah Izin dan Non Izin Yang Diterbitkan Berdasarkan Bidang
Keadaan s/d Desember Tahun 2024

NO.	BIDANG PERIZINAN	s/d Desember Tahun 2024
1.	KESBANGPOL	4.060
2.	PETERNAKAN	1.033
3.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	74
4.	PERHUBUNGAN	69
5.	LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN	61
6.	ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL	1
7.	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	63
8.	TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN KOPERASI	-
9	PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	6
10	PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	2
11	KESEHATAN	-
12	PUPR	-
13	BIDANG SOSIAL	4
	Jumlah	5.373

Izin yang diterbitkan melalui Front Office s/d bulan Desember Tahun 2024 sebanyak 5.373 buah izin yang diterbitkan atau (107,46 %).

Data perkembangan jumlah izin yang diterbitkan s/d bulan Desember Tahun 2024 pada masing – masing bidang di Provinsi NTT sebagaimana Gambar 4 berikut.



Gambar 4
Grafik Izin yang diterbitkan per Bidang
s/d bulan Desember Tahun 2024

Penerbitan perizinan berusaha melalui sistem OSS yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan klasifikasi pelaku usaha, Jumlah keseluruhan Nomor Induk Berusaha yang berhasil terbit di Bulan Januari s/d Desember sebanyak 35.954 dengan rincian Penanaman Modal Dalam Negeri sejumlah 35.924 dan Penanaman Modal Asing sejumlah 30 perusahaan, serta klasifikasi pelaku usaha UMK sebanyak 35.841 dan Non UMK 113 pelaku usaha.



Jumlah Perizinan Berusaha sesuai Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 (melalui sistem OSS-RBA), Jumlah izin yang terbit di Bulan Januari s/d Desember sebanyak 455 Izin, Sertifikat Standar 3.917, Perizinan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebanyak 957 dan yang dalam tahap pemenuhan Persyaratan Dasar sebanyak 18.708 permohonan izin.

B. Permasalahan, Dampak dan Upaya yang dilakukan

1. Permasalahan dan Dampak

- Belum optimalnya pelaksanaan tugas dari Tim Teknis.
- Belum adanya harmonisasi dan sinkronisasi regulasi terkait penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan.
- Pelaksanaan kegiatan masih ada yang belum dilengkapi dengan TOR kegiatan, untuk memastikan sasaran, hasil dan keluaran dapat terukur ;
- Seringnya lakukan revisi DPA, mengganggu penyerapan anggaran ;
- Pengajuan TOR kegiatan belum memenuhi unsur penyusunan TOR (kerangka acuan kerja) sesuai regulasi atau ketentuan yang berlaku (Judul TOR, Latar Belakang, Dasar Hukum,

Maksud, Tujuan, Tahapan Pelaksanaan Kegiatan, Sasaran, Hasil, Keluaran, Tempat (lokasi) dan Waktu pelaksanaan kegiatan, sumber dana (APBN, APBD), Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, item belanja, akun belanja/kode belanja sesuai DPA atau DIPA);

- f) Lambatnya penyelesaian administrasi pertanggungjawaban kegiatan termasuk perjalanan dinas (sesuai regulasi paling lambat 5 hari setelah pelaksanaan perjalanan sudah harus menyampaikan administrasi dan laporan perjalanan dinas), sehingga berpengaruh pada tahapan pengajuan anggaran ;
- g) Perjanjian Kinerja berjenjang belum sepenuhnya dilakukan evaluasi secara berkala pada masing-masing unit kerja antara yang diperjanjikan dengan hasil (output) aktivitas harian dan bulanan ;
- h) Perubahan struktur organisasi dominan jabatan fungsional belum berdampak cukup signifikan pada mekanisme dan pola kerja fungsional (untuk adanya inisiatif, inovasi dan kreativitas kerja dari pegawai).

2. Upaya yang dilakukan

- a) Melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait untuk percepatan verifikasi dokumen permohonan pelaku usaha;
- b) Pada tahun 2024 telah melakukan penyusunan Perda tentang penyelenggaraan penanaman modal sebagai acuan untuk perencanaan , pelaksanaan pengembangan potensi, promosi penanaman modal dan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal ke depannya;
- c) Merencanakan untuk penyusunan Perda tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah (sudah ada alokasi anggaran dalam DPA Tahun 2025) ;

- d) Melakukan migrasi perizinan secara manual ke Pelayanan secara elektronik melalui Aplikasi Si Cantik Cloud;
- e) Menyusun peta potensi dan peluang investasi daerah serta mengupdate data potensi dalam aplikasi Potensi Investasi Regional (PIR) Provinsi NTT ;
- f) Membuat video digital promosi potensi dan peluang investasi produk unggulan daerah ;
- g) Melakukan berbagai inovasi untuk percepatan pelayanan kepada masyarakat.

C. Penutup

Demikian Laporan Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan keadaan s/d bulan Desember Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 dibuat dan kiranya menjadi bahan masukan untuk pengambilan kebijakan dan langkah-langkah strategis dalam upaya percepatan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT pada masa yang akan datang.

Kupang, 31 Januari 2025

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Mahy Husea Belokila, S.Sos., MM

Kepala Muda

1127 199803 1 005

**EVALUASI CAPAIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA (PK)
KEADAAN S/D DESEMBER TAHUN 2024**

SASARAN STRATEGIS (RPJMD/ RENSTRA)	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PENJELASAN
I. Komponen Kinerja Utama					
Meningkatnya Realisasi Investasi	1. Penambahan Nilai Realisasi Investasi	5,7 T	Rp. 4.218.937.900.000,-	74%	Data Realisasi keadaan s/d Triwulan IV Tahun 2024.
	2. Laju Pertumbuhan PMDN	0.7%	-1,56%	-100%	Data Realisasi keadaan s/d Triwulan IV Tahun 2024, bila dibandingkan dengan Tahun 2023 maka ada penurunan.
	3. Laju Pertumbuhan PMA	0.3%	-1,56%	-100 %	Data Realisasi keadaan s/d Triwulan IV Tahun 2024, bila dibandingkan dengan Tahun 2023 maka ada penurunan.
	4. Persentase izin dan non izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	100% (5.000 Izin)	5.373 (107,46%)	107,46%	Jumlah izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP 5.373 izin (107,46%)
Terwujudnya Kepuasan Layanan Perizinan					

dan Non Perizinan	5. Nilai indeks kepuasan masyarakat meningkat	95	94,82	99,81%	Survey dilakukan setiap bulan, Hasil Survey IKM TW. I 93,37 (98,28%); TW. II 91,31 (96,11%); TW III 92,53 (98,28%); Triwulan IV 94,82 (99,81%)
	6. Jumlah Inovasi Layanan	1 Jenis Inovasi	1	100%	Inovasi Layanan SiCantik Cloud
	7. Realisasi Belanja Program Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	90%	91,22% (Rp.6.398.534.343,-)	101,36%	Sesuai data fungsional. s/d bulan Desember 2024 (91,22%)
	8. Realisasi 5 Program Urusan wajib	90%	90,49% (Rp. 2.353.897.705)	90,49%	Sesuai data fungsional. s/d bulan Desember 2024 (90,49%)
	9. Realisasi APBN (Dana Dekonsentrasi) Tahun anggaran 2024	90%	99,58% (Rp. 572.633.221,-)	110%	Sesuai Data Realisasi s/d bulan Desember 2024 Rp. 572.633.221,-
	10. Belanja Pengadaan Barang Perangkat Daerah menggunakan Aplikasi e-purchasing	40% dari Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa	20%	50%	Sudah menggunakan Aplikasi e-purchasing
	11. Pengadaan barang dan jasa yang sudah terkontrak harus direalisasi 100% pertanggal 31 Desember 2024	100% Pertanggal 31 Desember 2024	100%	100%	Sudah terlaksana semuanya
	12. Penyampaian LPPD, LKPJ dan LKIP paling lambat 12 februari 2024;	12 Februari 2024	29 Januari 2024	100%	Lebih cepat dari batas waktu yang ada

	13. Penyampaian LHKPN & SPT Tahunan paling lambat tanggal 31 Maret 2024;	31 Maret 2024							
	14. Nilai Pelaksanaan SAKIP Minimal BB (> 70-80)	80	81,51	101,25%	Hasil Penilaian Tim Evaluasi AKIP Provinsi NTT 81,51 (Memuaskan)				
	15. Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal Baik	Baik	96,09	Baik	Penilaian Kinerja Individu dalam SKP bernilai Baik				
	16. Persentas Tindak Lanjut Temuan BPK dan APIP								
	a. Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2024 : Administrasi 100% Keuangan 80%	100% & 80%	-	-	Belum ada Datanya				
	b. Tindak Lanjut Rekomendasi di bawah tahun 2024 ; administrasi 100% Keuangan 80%	100% & 80%	-	-	Belum ada Datanya				
	17. Jumlah inovasi perangkat daerah minimal 5 inovasi	5 Inovasi	5 Inovasi	100%	Grab Pisel, Si Jempol (Jemput Bola), Si Cantik Cloud , Klinik Pedal, PKS				
	18. Penciptaan Arsip Elketronik (Korespondensi surat masuk dan surat keluar) melalui Aplikasi Srikandi	80%	100%	100%	Sudah menggunakan Aplikasi Srikandi				
	19. Indeks kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik /Minimal kategori Baik (76,61-88,30)	88,30	94,82	107,38%	Hasil Survey Triwulan I Sangat Baik (93,37)Triwulan II Sangat Baik (91,31) Triwulan III Sangat Baik (92,53), Triwulan IV Sangat Baik (94,82)				

	20. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Minimal Kategori Menuju Informatif (80 -89,99);	80-89,99	93,01	103,35%	Kategori Informatif sesuai Hasil Penilaian KIP Provinsi NTT
	21. Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Mitra /NGO/LSM/Pihak Lain yang mendukung pencapaian target IKU Perangkat Daerah.	2	2	100%	2 Kerjasama yaitu : PKS dengan PT Mince Group Indonesia & PKS dgn PT. Grab Indonesia untuk pengantaran Izin

Kupang, 31 Januari 2025

↳ Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Nusa Tenggara Timur, 